



Pendahuluan

Ki Hadjar Dewantara senantiasa menuturkan, pendidikan serba otak (*verstandelijke opvoeding*) saja tidak cukup, tetapi masih harus ada pendidikan jiwa dan budi pekerti (*geestelijke opvoeding*). Pintar saja belum cukup, kita perlu arif, rendah hati, dan manusiawi. Di negeri ini mungkin sudah banyak orang pintar, paling tidak sebagaimana ditunjukkan oleh para elite politik. Tetapi banyak yang sepakat mereka dan bahkan kita semua sebagai bangsa, makin kehilangan kearifan, kerendahan hati, dan sentuhan kemanusiaan sebagaimana dianjurkan Ki Hadjar tersebut.

Berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa apresiasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan terasa semakin surut. Konflik-konflik yang berlatar belakang SARA terus berkobar secara susul-menyusul yang disertai jatuhnya korban jiwa.

Ketika pemerintah menggulirkan otonomi daerah, ancaman konflik etnis justru merebak ke mana-mana. Meski harus diakui gejala di berbagai daerah itu merupakan ekspresi

demokrasi sebagai hasil reformasi, namun cukup memprihatinkan karena proses demokratisasi itu diikuti oleh tuntutan primordialistik yang terus bergelombang mengarah pada disintegrasi bangsa. Memang, semua itu merupakan implikasi logis dari maraknya semangat sentralisme di era pemerintahan Orde Baru yang mengeksploitasi daerah. Tetapi mestikah respons yang cenderung mengobarkan semangat kedaerahan untuk memisahkan diri dari kesatuan nasional harus meminta ongkos kemanusiaan yang demikian besar?

Bahkan itu pun seakan masih belum cukup, demi perebutan kekuasaan, di antara kita sebagai bangsa masih saling dan mengancam saling menghabisi dengan membentuk apa yang mereka klaim sebagai pasukan berani mati, yang diimbangi dengan pembentukan laskar-laskar sejenis dari masing-masing kelompok yang berseteru. Nilai-nilai kemanusiaan dikorbankan demi ambisi politik kelompok dan golongan. Ini semua menjadi indikator bahwa kepekaan, daya tangkap dan pemahaman terhadap nilai kemanusiaan terus mengalami kemunduran terdesak oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek yang primordialistik.

Mengabaikan humaniora

Mengapa kita sebagai bangsa semakin kehilangan rasa kemanusiaan dan kearifan dalam berbangsa? Salah satunya adalah karena kita cukup lama mengabaikan atau paling tidak meminggirkan pendidikan humaniora. Marginalisasi humaniora ini mulai terasa ketika pemerintahan Orba menggandrungi paradigma konsensus dan pemikiran *developmentalism*. Apa saja yang dianggap anti pembangunan dan tidak mengarah pada ketundukan total serta kepatuhan tunggal, saat itu memperoleh tekanan hebat. Situasi ini menciptakan fenomena penyeragaman yang sangat alergis dengan keanekaragaman, sehingga pemikiran dan aktivitas yang bersifat eksploratif dan mengedepankan pentingnya

pluralitas disingkirkan.

Awan semakin tebal menyelimuti humaniora, taikala fenomena hegemoni negara terhadap masyarakat mulai terasa marak demi terpeliharanya stabilitas nasional. Karena tujuan utamanya demi terciptanya masyarakat yang terkendali, maka arus penyeragaman terus menderas menghanyutkan keanekaragaman. Padahal eksistensi humaniora justru terletak pada kebebasan berpikir dan kebebasan dalam bereksplorasi, serta kegandrungannya dengan pluralisme.

Sekarang ini iklim keterbukaan sudah tercipta, dan para intelektual memperoleh ruang kebebasan untuk mengaktualisasikan dan mengeksplorasi pemikiran. Ini adalah momen





foto: www.sosbud.kompas.com

yang bagus untuk lebih meningkatkan apresiasi terhadap humaniora. Sayangnya, hiruk-pikuk kehidupan politik kepartaian cukup mengganggu kalangan intelektual, sehingga dalam proses eksplorasi di bidang kebudayaan misalnya, tidak berlangsung secara intens, karena terkungkung oleh kepentingan-kepentingan politik kepartaian yang tidak netral.

Humaniora merupakan nilai yang bersifat universal, karena itu mampu menembus batas-batas agama dan perspektif ideologis lainnya, sehingga bisa mengatasi pandangan sempit primordial. Mahatma Gandhi mampu menyatukan India untuk melawan kolonialisme Inggris dengan prinsip perjuangan yang sangat humanistik. *My nationalism is humanism*, begitu semboyannya yang amat sangat terkenal dan berhasil ditanamkan pada bangsanya. Meski kemudian dunia menyaksikan ia menjadi korban kekerasan, Bapak humanisme itu tetap lekat dengan perjuangan anti kekerasan, dan hingga sekarang spirit ini tetap mewarnai banyak aktivis pro demokrasi.

Bung Karno membangun identitas kebangsaan juga dengan prinsip humanisme. Ia senantiasa menekankan bahwa ke-Indonesiaan yang

dikembangkan adalah ke-Indonesiaan yang berwarna dan berjiwa kemanusiaan secara universal, bukan kebangsaan yang sempit. Jelas ini adalah suatu paham kebangsaan yang tidak picik, tidak rasialis, dan tidak takut kepada dunia luar atau pengaruh dari luar.

Paham semacam itu kiranya kini masih relevan, jika melihat persoalan terberat kita sekarang, yaitu krisis kebangsaan dan krisis identitas. Ketika modal dan potensi untuk membangun bangsa mulai habis, tetapi modal yang berwujud tekad dan kemauan untuk berdikari sebagaimana ditekankan Bung Karno perlu tetap terpelihara dalam jiwa bangsa. Walaupun kita sebagai bangsa sekarang miskin secara

ekonomi, miskin secara industri, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa dihilangkan, yaitu kehendak untuk mandiri.

Sementara tokoh humanis lain, Soedjatmoko, menekankan bahwa hidup dan nasib manusia sebagai sebuah bangsa pada dasarnya tergantung pada apa yang dilakukannya sendiri, yaitu pada kemampuannya untuk memilih dan mengolah kemungkinan yang terdapat dalam dunia ini. Keberhasilan dan kegagalannya dalam hidup tidak ada hubungannya dengan kekuatan-kekuatan dari luar. Dengan demikian kesadaran sejarah adalah perlawanan manusia terhadap determinisme untuk merebut kembali kebebasan manusia dalam menentukan tujuan dan jalan hidupnya dan menegakkan otonomi dirinya dalam berhadapan dengan kekuatan-kekuatan luar.

--- -- -- -- -- Kearifan lokal

Kimberly A. Maynard dalam bukunya yang berjudul *Healing Communities in Conflict* (1999), mengingatkan bahwa sejak pasca Perang Dingin karakter konflik di berbagai belahan dunia mengalami pergeseran dari konflik ideologis ke konflik identitas yang antara lain juga berlatar belakang etnis dan agama. Gejala ini juga sudah mulai tampak di negara kita, konflik dan kekerasan terus terjadi secara bergelombang.

Proses dehumanisasi yang terjadi di berbagai lokasi di Indonesia sebagai akibat benturan antar-nilai, penyembuhannya bisa dilakukan dengan humanisme yang digali dari kearifan lokal itu sendiri. Banyak yang sepakat bahwa sesungguhnya tradisi-tradisi lokal dan kebudayaan lokal sarat dengan nilai-nilai humanistik yang jika tidak terkontaminasi dengan nilai-nilai luar masih efektif sebagai solusi konflik. Dalam kebudayaan Jawa misalnya, prinsip harmoni, hingga saat ini diduga menjadi salah satu kekuatan yang bisa meredam konflik yang eksplosif. Inilah sebabnya, mengapa di wilayah subkultur Mataraman kadar konflik sosial relatif rendah, meskipun secara politik dan ekonomi potensial untuk konflik.

Humaniora yang bersumber dari kearifan lokal semacam itu kiranya juga dimiliki oleh setiap kebudayaan di daerah. Oleh karena itu berbagai upaya untuk mengidentifikasi nilai-nilai lokal yang humanistik perlu dilakukan, untuk kemudian diinternalisasikan melalui pendidikan keluarga

maupun pendidikan sekolah. Reaktualisasi kearifan lokal semacam itu lambat-laun juga akan menjadi dasar dalam etika pergaulan sosial. Dan oleh karena kearifan lokal itu sarat mengandung humanisme, maka akan dapat terjadi *cross cutting* dalam pergaulan kebudayaan antardaerah di lingkup nasional, sebab humanisme bersifat universal. Proses ini nantinya akan menimbulkan perhimpitan antarnilai dari berbagai daerah, sehingga potensial menjadi identitas kebudayaan nasional.

Begitulah, dalam situasi kegalauan dan kegamanan untuk kembali menjadi sebuah bangsa yang bersatu seperti sekarang ini, lalu ke mana kita harus berpaling? Barangkali, walaupun kita telah dihantui perasaan dendam sebagai akibat dari peristiwa dehumanistik, tetapi kita sebagai bangsa tetap merasa perlu berpaling pada humaniora. Karena itu, yang perlu diupayakan dalam berbagai aktivitas pendidikan masyarakat adalah tetap memperhatikan dan mempertahankan humaniora dalam membentuk kearifan berbangsa.

Harapan yang ingin diraih adalah agar kita sebagai bangsa dapat memahami dan mencapai kemanusiaan sebaik-baiknya, sehingga mengerti siapakah manusia dan bagaimana memperlakukan manusia lain sebagaimana manusia.

--- -- -- -- -- Pendidikan Multikultural

Satu semangat dengan pendidikan humaniora adalah pendidikan multikulturalisme yang belakangan ini menjadi isu utama dalam wacana pendidikan nasional. Secara konseptual, multikulturalisme berbeda dengan pluralisme. Pluralisme hanya sebuah pengakuan terhadap keanekaragaman, tentang kemajemukan atau kebhinekaan, bahwa di sana terdapat berbagai macam ras, suku, agama atau kelompok-kelompok budaya. Sedangkan multikulturalisme

lebih sekadar pengakuan tetapi membuka ruang untuk akses dan berekspresi bagi semua elemen keanegaraman tersebut dengan bersandar pada jati diri masing-masing, dan kemudian saling berkomunikasi tanpa harus saling mematikan satu sama lain.

Multikulturalisme mengakui berbagai potensi dan legitimasi keragaman dan perbedaan sosio-kultural tiap-tiap kelompok etnis, ras, agama, dan entitas kebudayaan. Dalam pandangan ini

baik sebagai individu maupun kelompok dari berbagai kesatuan sosial bisa bergabung dalam masyarakat, terlibat dalam *societal cohesion* tanpa harus kehilangan identitas kulturalnya, sekaligus tetap memperoleh hak-hak mereka untuk berpartisipasi penuh dalam berbagai bidang kegiatan masyarakat.

Sesungguhnya pendekatan multikulturalisme dalam dunia pendidikan bukanlah hal baru. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa (Unesco) sudah cukup lama mengintrodusir pendekatan tersebut dan menganjurkannya kepada negara-negara yang warganya hiterogen.

Dalam pada itu, sudah selayaknya jika sistem pendidikan nasional mengadopsi pendekatan multikulturalisme ini sebagai spirit utama dalam membangun peserta didik. Kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia merupakan mozaik, yang terdiri dari beragam etnis, agama, golongan, dan kebudayaan. Dengan kata lain, keragaman budaya, agama, dan etnis serta berbagai variasinya dalam suatu masyarakat adalah kenyataan sejarah Indonesia. Oleh karena itu, setiap ketentuan normatif yang menjadi pemandu dalam berbagai aktivitas publik setingkat undang-undang, jika mengingkari kenyataan tersebut bisa dikatakan sebagai rumusan yang ahistoris. Sudah menjadi semacam hukum sosial, setiap kali muncul ketentuan normatif yang tidak berangkat dari kenyataan historis masyarakat itu sendiri, akan timbul resistensi yang pada gilirannya berpotensi

konflik dan sewaktu-waktu bisa eksplosif.

Sesungguhnya pendekatan multikulturalisme dalam dunia pendidikan bukanlah hal baru. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa (*Unesco*) sudah cukup lama mengintrodusir pendekatan tersebut dan menganjurkannya kepada negara-negara yang warganya heterogen. Anjuran Unesco ini disemangati oleh ucapan antropolog, Claude Levi-Strauss, bahwa keberagaman budaya ada di belakang, di depan, dan di sekeliling kita. Satu-satunya kebutuhan kita adalah bagaimana membuat semua (keberagaman) itu memberikan sumbangannya yang paling berharga bagi semua orang.

Sistem pendidikan nasional mesti sensitif terhadap masalah keberagaman tersebut, karena posisinya sangat strategis dalam membangun watak bangsa yang tidak sektarian, tetapi toleran, demokratis, dan humanistik. Pendidikan yang disemangati oleh multikulturalisme sangat penting bagi bangsa Indonesia karena apresiasi dan saling hormat-menghormati terhadap perbedaan harus dibentuk dari tingkat paling dini dalam kehidupan anak.

Konsep kurikulum muatan lokal (*mulok*) sebenarnya sudah merupakan penerapan pendidikan multikulturalisme. Dengan kurikulum seperti itu akan berkembang apresiasi kreativitas kultural masyarakat lokal oleh anak-anak sekolah di daerah masing-masing. Tetapi program ini akan terancam gagal, jika di negeri ini membiarkan iklim politik dan aturan normatif dalam bentuk produk undang-undang mengkondisikan lahirnya kekuatan dominatif atas nama negara. Sebab kemunculan kekuatan dominatif baru akan senantiasa berpotensi melakukan penyeragaman sehingga anti dialog dan negosiasi kultural.

>>> — — — — Anti-multikulturalisme

Bahwa Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen semua sudah tahu. Tetapi sejarah juga menunjukkan bahwa ada saja kekuatan yang ingin mengingkari kenyataan itu dan kemudian memaksakan menjadi masyarakat yang homogen dengan dalih demi persatuan dan kesatuan atau

demi mitos mayoritas sebagaimana yang dilakukan oleh kuasa negara dan agama. Yang dibayangkan kemudian sebuah kekuatan dominatif dan tentu saja pilihan yang ditempuh adalah melakukan penyeragaman, yang anti keanekaragaman, anti lokalitas, dan juga berarti anti-demokrasi.



Sadar atau tidak berbagai produk perundangan yang menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan, sedikit-banyak mengandung muatan tersebut, sehingga dapat dikatakan kurang sesuai dengan semangat multikulturalisme. Kita akan melihat kekuatan dominatif baru yang akan melakukan proyek penyeragaman jilid II, yang pelakunya tidak lagi kuasa negara, tetapi kuasa agama, atau lebih tepat lagi adalah kekuasaan agama lewat negara.

Oleh karena itu, berbagai produk normatif seperti itu segera perlu direvisi dengan memasukkan semangat multikulturalisme. Kita perlu mengupayakan terbentuknya ketentuan normatif yang memfasilitasi bagi berkembang dan terbangunnya masyarakat multikultural. Atau meminjam istilah Ahmad Baso (2003) dalam bukunya *Plesetan Lokalitas*, harus ada strategi mempreteli kekuatan dominatif untuk menuju masyarakat multikultural yang dibayangkan. Yaitu suatu persekutuan sosio-kultural di mana ruang-ruang akses, ekspresi, dan kemungkinan memanfaatkannya terbagi secara merata di

antara berbagai individu maupun kelompok sosial dan kultural. Saling memahami, mengerti, menghormati, memberi ruang akses, ekspresi dan apresiasi, atau saling *nguwongke* di antara sesama warga masyarakat di suatu wilayah tertentu dengan tetap menyadari keberadaannya dalam tataran agama, budaya, aspirasi politik, pendidikan, asal-usul, etnis dan semacamnya.

Untuk itu, kita semua dapat kembali merenungkan dan mengupayakan kembali ideologi nasional Pancasila yang dasarnya adalah bhineka tunggal ika dalam tafsir humanistik dan multikultural. Tentu saja dengan tetap menjaga agar Pancasila itu sendiri tidak dipakai oleh kalangan yang mengklaim sebagai nasionalis atau ultra-nasionalis. Tetapi menempatkannya sebagai sumber nilai yang bebas tafsir dalam konteks keindonesiaan yang multikultural. Dengan sistem pendidikan yang dijiwai semangat Pancasila seperti itu, barangkali energi kita tidak akan habis dipakai untuk bertikai antarbangsa sendiri baik sekarang maupun masa depan.

Implementasi

Bagaimana konsep pendidikan humanistik dan multikultural itu diimplementasikan dalam praksis pendidikan? Dengan kata lain, demi terwujudnya masyarakat demokratis dalam bingkai negara kesatuan, multikulturalisme harus dipandang sebagai isu strategis. Artinya, gagasan tersebut tidak cukup diwacanakan, tetapi harus diwujudkan dalam tataran praksis. Beberapa langkah rintisan kiranya dapat ditempuh, antara lain adalah:

1. Konsep dan praktik pembelajaran multikultural perlu dirumuskan melalui sebuah forum yang melibatkan semua elemen yang ada dalam masyarakat.
2. Perlu dibentuk organisasi yang aktif menggiatkan multikulturalisme, dapat berupa konsorsium, biro, atau apa pun namanya yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional.
3. Organisasi tersebut harus memiliki kewenangan politik, hukum, dan moral dan

terus menjadi motor dalam kegiatan untuk mewujudkan multikulturalisme.

4. Organisasi tersebut mesti didukung oleh tenaga yang berkompeten di bidang multikulturalisme.
5. Segera perlu mengimplementasikan pendidikan multikultural ke sekolah-sekolah, yang didukung kebijakan pemerintah untuk pengadaan guru, materi pengajaran, dan pengadaan buku-buku pelajaran.

Begitulah, dengan pendidikan humanistik dan multikultural, kiranya nilai dan spirit kemanusiaan dan keanekaragaman terus mengalami proses internalisasi pada setiap generasi, sehingga tumbuh sikap toleran, saling menghargai, dan berperikemanusiaan dalam bingkai negara kesatuan yang bernama Indonesia.